

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT DALAM MENCEGAH DAN MENDETEKSI KECURANGAN DI PARLEMEN INDONESIA

Fitriyani Lestari

fitriyani.lestari92@gmail.com

Universitas Trisakti

Abstrak

Pemberitaan atau isu mengenai tindak kecurangan di lingkungan DPR, MPR dan DPD RI bukan merupakan hal yang asing lagi, terlebih lagi sumber anggaran atas kegiatan lembaga parlemen tersebut adalah berasal dari APBN, sudah selayaknya tata kelola dan pengendalian internal di lembaga tersebut berjalan dengan efektif. Enterprise Risk Management (ERM) merupakan salah satu tools yang digunakan dalam rangka meningkatkan tata kelola dan pengendalian internal yang diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan. Penelitian ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko melalui lima pilar COSO ERM Integrated Framework di DPR, MPR dan DPD RI dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Penelitian ini menggunakan mixed method yaitu dengan gabungan penelitian kualitatif dan kuantitatif melalui survei dan uji regresi dengan 75 kuesioner dan wawancara dengan responden yang merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Menurut hasil penelitian manajemen risiko, evaluasi dan pelaporan memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan terjadinya kecurangan, lebih lanjut hasil penelitian juga menunjukkan bahwa governance, strategi, manajemen risiko dan pelaporan memiliki pengaruh signifikan dalam upaya mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara empiris Enterprise Risk Management memberikan kontribusi dalam meminimalkan dan mengidentifikasi kecurangan di DPR, MPR, dan DPD RI.

Kata Kunci: Enterprise Risk Manajemen, Internal Audit, Kecurangan.

Abstract

Reporting or issues regarding acts of fraud within the DPR, MPR and DPD RI are not something new, moreover the source of the budget for the activities of these parliamentary institutions comes from the APBN, it is appropriate for governance and internal control in these institutions to run effectively. Enterprise Risk Management (ERM) is one of the tools used to improve governance and internal control which is expected to prevent and detect fraud. This research discusses the implementation of risk management through the five pillars of the COSO ERM Integrated Framework in the DPR, MPR and DPD RI in preventing and detecting fraud. This research uses a mixed method, namely a combination of qualitative and quantitative research through surveys and regression tests with 75 questionnaires and interviews with respondents who are Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). According to research results, risk management, evaluation and reporting have a significant influence on efforts to prevent fraud. Furthermore, the research results also show that governance, strategy, risk management and reporting have a significant influence on efforts to detect fraud. The results of this research show that empirically Enterprise Risk Management contributes to minimizing and identifying fraud in the DPR, MPR and DPD RI.

Keywords: Enterprise Risk Management, Internal Audit, Fraud.

PENDAHULUAN

Kecurangan atau fraud, masih menjadi isu yang hangat dan menarik untuk dibahas terutama pada kasus-kasus yang terkait dengan masalah keuangan yang melibatkan instansi pemerintahan baik Kementerian Negara maupun Lembaga khususnya Lembaga Politik di Indonesia. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan fraud (kecurangan) yaitu penggunaan suatu jabatan oleh seseorang untuk memperkaya dirinya

melalui penyalahgunaan yang disengaja atau penyalahgunaan penggunaan aset atau sumber daya organisasi. Korupsi di Indonesia seperti halnya juga di beberapa negara lain, banyak berkorelasi dengan penyalahgunaan kekuasaan dari para pemegang kekuatan politik. Watak kekuasaan pada dasarnya berambisi untuk memperbesar pengaruh, memperluas jangkauan dan cengkeramannya terhadap rakyat yang seringkali tidak memiliki kekuatan kontrol yang signifikan terhadap kekuasaan yang selalu merambat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat maupun daerah merupakan representasi dari rakyat pemilihnya, sehingga akan memengaruhi kepercayaan konstituennya jika para wakil yang dipilihnya terlibat korupsi. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui bahwa, Indeks Integritas DPR RI masih dilevel “waspada” dengan skor 77,4 pada tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena beberapa dimensi seperti pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), pengelolaan anggaran, transparansi dan keadilan layanan yang rendah serta keberadaan suap, gratifikasi, penyalahgunaan fasilitas kantor, dan risiko jual beli jabatan yang masih tinggi.

Seringkali kecurangan terjadi karena internal kontrol kurang dirancang dengan baik dan lemahnya tata kelola yang merusak proses organisasi. Organisasi sudah seharusnya memiliki prosedur pengendalian internal yang kuat untuk membatasi risiko. Banyak upaya untuk mencegah praktik kecurangan yang telah dilakukan, dengan harapan praktik kecurangan dapat diantisipasi sedini mungkin. Salah satunya adalah mencegah kecurangan dengan menerapkan manajemen risiko, yang menggambarkan bahwa risiko adalah suatu konsep yang menggambarkan suatu ketidakpastian, atau suatu kejadian atas kondisi yang berkaitan dengan hambatan dalam mencapai tujuan (Susilo & Victor, 2019).

Terkait dengan manajemen risiko, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO) mengembangkan control framework yang disebut Enterprise Risk Management (ERM) Integrated Framework. COSO menekankan bahwa risiko harus dikelola oleh seluruh pihak di dalam organisasi dan harus sesuai dengan tujuan organisasi. Enterprise Risk Management (ERM) Integrated Framework yang dikembangkan oleh COSO adalah salah satu model risk-based auditing yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan menilai risiko (Curtis & Carey, 2012).

COSO menyusun model pengendalian internal yang handal beserta risiko dan tata kelola organisasi. Setiap tahunnya COSO terus melakukan pembaharuan, pembaharuan terbaru pada tahun 2017 dengan diterbitkannya COSO ERM Integrated Framework. Pada pembaharuan yang terbaru ini, framework tersebut mengembangkan lebih lanjut pada pengendalian internal dengan memberikan perhatian utama pada subjek ERM yang lebih luas, oleh karena itu, dengan penerapan COSO ERM Integrated Framework memberikan harapan baru bagi organisasi untuk lebih meningkatkan kehandalan pengendalian internalnya, sehingga produktivitas dan profitabilitas organisasi meningkat.

Lima pilar ERM berdasarkan COSO (2013) yaitu control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan monitoring secara signifikan mempengaruhi upaya dalam pencegahan penipuan dan juga dapat digunakan dalam upaya deteksi kecurangan di Pemerintahan Jawa Barat (Tarjo et al., 2022). Sistem pengendalian intern sesuai dengan kerangka kerja COSO berpengaruh positif untuk menghindari kesalahan dan kecurangan (Debora 2022). Audit internal, bersama dengan sistem pengendalian internal, khususnya lingkungan pengendalian yang diartikulasikan dengan baik, mempengaruhi kualitas dan keakuratan informasi yang disampaikan kepada publik. dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian lain juga menjelaskan bahwa kerangka COSO 2004, perannya juga sangat luas dalam memantau dan mendeteksi tidak hanya risiko operasi dan penipuan tetapi juga strategis risiko perusahaan afiliasi (Sangil Kim, 2017).

Manajemen Risiko Perusahaan juga merupakan alat untuk mencegah penipuan (Ayagre et al., 2014; Rahman & Al Dhaimesh, 2018; Venter, 2007). Umumnya penelitian sebelumnya berfokus pada perusahaan keuangan yaitu asuransi (Hoyt & Liebenberg, 2011; McShane et al., 2011; Nguyen & Vo, 2020). Namun, masih sedikit pembahasan Enterprises Risk Management di organisasi pemerintah Organisasi pemerintah (lembaga politik) tentunya sangat berbeda dengan perusahaan listing atau keuangan yang selama ini menjadi objek Enterprises Risk Management. Padahal menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terjadi potensi kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi yang mengalami peningkatan. Menurut ICW dalam semester I tahun 2022, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang melibatkan 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka dengan potensi korupsi mencapai mencapai Rp 33,665 triliun yang Sebagian besar terjadi di pemerintahan pusat maupun daerah. Korupsi di Indonesia seperti halnya juga di beberapa negara lain, banyak berkorelasi dengan penyalahgunaan kekuasaan dari para pemegang kekuatan politik. Praktik korupsi di lembaga politik itu muncul dalam berbagai corak dan variasinya karena terkait dengan jenis dan tingkat penyalahgunaan wewenang, kesempatan, dan sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan penguasa politik. Hal tersebut seringkali terjadi karena kontrol kurang dirancang dengan baik dan lemahnya tata kelola yang merusak proses organisasi.

Dalam penelitian ini manajemen risiko menjadi suatu kebutuhan bagi seluruh instansi, tidak terkecuali bagi instansi pemerintah. Dalam instansi pemerintah manajemen risiko disinggung dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang merupakan adopsi dari COSO Internal Control Framework dengan dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pemerintahan di Indonesia. Mengapa diklaim mengadopsi karena dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, aspek-aspek seperti control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan monitoring merupakan dimensi yang tepat dalam Enterprises Risk Management Committee of Sponsoring Organization (COSO). Namun, Enterprises Risk Management masih belum diterapkan secara optimal di Instansi Pemerintahan Indonesia

Melalui penerapan manajemen risiko auditor internal dapat berperan dalam membantu manajemen dengan melakukan deteksi dan investigasi kecurangan di saat yang sama menentukan apakah organisasi memiliki kontrol internal yang memadai. Peran audit internal termasuk mendeteksi, mencegah, dan memantau risiko kecurangan dan mengatasi risiko tersebut melalui audit dan investigasi. Internal audit harus mempertimbangkan dimana ada risiko kecurangan dalam suatu organisasi dan merespons secara tepat dengan melakukan audit atas kontrol di area tersebut, mengevaluasi potensi timbulnya kecurangan dan bagaimana organisasi mengelola risiko kecurangan tersebut (Standar 2120.A2) melalui penilaian risiko, dan perencanaan audit.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kombinasi atau mixed method yaitu pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (mencakup landasan filosofis, penggunaan pendekatan dan mengkombinasikan kedua pendekatan dalam penelitian).

Dalam penelitian ini menggunakan The explanatory sequential design yang merupakan cara pengumpulan data yang diawali dengan pengumpulan data kuantitatif kemudian dilanjutkan pengumpulan data kualitatif untuk membantu menganalisis data. Pada tahap awal penelitian ini akan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner.

Tujuan langkah ini adalah untuk mengumpulkan data dan mengidentifikasi informan untuk tahap selanjutnya.

Pada tahap kedua teknik kualitatif akan digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara untuk menentukan bagaimana Manajemen Risiko Perusahaan dapat mencegah dan mengidentifikasi penipuan. Teknik kuantitatif akan memberikan gambaran secara luas mengenai tema penelitian. Kemudian berdasarkan teknik kuantitatif tersebut akan dilakukan analisis secara kualitatif dan dilakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan perspektif responden atas tema penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uji statistic deskriptif diketahui bahwa, dengan mengacu pada nilai rata-rata variabel governance, strategi, manajemen risiko, evaluasi, dan pelaporan menunjukkan persepsi responden menggambarkan bahwa DPR, MPR dan DPD RI dapat menerapkan Enterprise Risk Management secara efektif. Nilai rata-rata yang tinggi menegaskan pernyataan tersebut. Namun hasil pemantauan lebih lanjut menunjukkan nilai rata-rata di bawah 20 yang menggambarkan bahwa responden cenderung ragu-ragu dalam menerapkan Enterprise Risk Management yang diukur dengan variabel strategi. Sedangkan untuk pencegahan menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa responden setuju untuk menerapkan tindakan pencegahan penipuan di lingkungan DPR, MPR dan DPR RI. Selanjutnya, nilai rata-rata variabel deteksi juga tinggi, yang mana sama dengan variabel pencegahan. Oleh karena itu, penerapan ERM perlu dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan di DPR, MPR dan DPD RI.

Tabel 3. Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Governance	75	18.00	24.00	21.4400	2.25556
Strategi	75	16.00	20.00	19.0000	1.18550
Manajemen Risiko	75	18.00	24.00	21.6533	2.09564
Evaluasi	75	18.00	24.00	21.8400	2.23631
Pelaporan	75	21.00	28.00	24.8133	2.06446
Pencegahan Kecurangan	75	18.00	28.00	22.5200	3.11648
Pendeteksian Kecurangan	75	18.00	24.00	21.0933	2.23107
Valid N (listwise)	75				

Hasil Uji Regresi

Pada tabel 5 hasil uji regresi menampilkan bahwa lima pilar ERM dalam pengujian variabel terhadap upaya pencegahan di lingkungan DPR, MPR dan DPD RI berpengaruh signifikan pada variabel manajemen risiko, evaluasi dan pelaporan terhadap upaya pencegahan kecurangan. Sedangkan pada variable governance dan strategi memiliki t hitung lebih kecil yaitu sebesar 0,316 untuk governance dan 0,200 untuk strategi jika dibandingkan dengan t table sebesar 1,666 selain itu juga variabel governance dan strategi memiliki nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 yang berarti variabel tidak signifikan. Oleh karena itu analisis hipotesis menunjukkan bahwa H1 dan H2 tidak dapat diterima yang mana hasilnya menunjukkan bahwa tidak seluruh pilar ERM dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah terjadinya kecurangan di DPR, MPR dan DPD RI.

Tabel 5 Uji Regresi Pencegahan Kecurangan sebagai Dependen Variabel

Tabel 5 Uji Regresi Pencegahan Kecurangan sebagai Dependen Variabel							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
		B	Std. Error	Beta			
		1	(Constant)	.757			
	Governance	.109	.345	.079	.316	.753	H1 ditolak
	Strategi	-.054	.268	-.020	-.200	.842	H2 ditolak
	Manajemen_Risiko	1.004	.354	.675	2.834	.006	H3 diterima
	Evaluasi	-.553	.245	-.397	-2.256	.027	H4 diterima
	Pelaporan	.435	.179	.288	2.428	.018	H5 diterima

a. Dependent Variable: Pencegahan_Kecurangan

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko memiliki nilai t hitung paling besar ($t = 2,834$) jika dibandingkan dengan variabel lain yang berarti H3 diterima. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa manajemen risiko memiliki pengaruh yang signifikan dalam upaya pencegahan kecurangan di DPR, MPR dan DPD RI. Hasil ini juga membuktikan bahwa responden menganggap manajemen risiko sebagai komponen ERM yang paling penting dalam pencegahan kecurangan atau fraud. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Tarjo et al, tahun 2022 yang menyebutkan bahwa :

“Manajemen Risiko memiliki peran dalam penilaian risiko yang ada di pemerintah daerah yang mana menunjukkan bahwa pemerintah daerah setuju untuk melihat penilaian risiko apakah risiko yang dihadapi akan menghambat tujuan organisasi dan pencegahan kecurangan”

COSO juga mengatakan penilaian risiko merupakan kunci penting untuk tata kelola perusahaan yang efektif. Pengendalian intern harus fleksibel menghadapi perubahan terkait risiko yang dihadapi organisasi. Dengan cara ini, DPR, MPR, dan DPR RI dapat lebih memperkuat upaya mereka dalam mencegah kecurangan.

Pada variabel evaluasi dan pelaporan terhadap pencegahan kecurangan juga memiliki hasil signifikan dengan t hitung sebesar 2,256 untuk variabel evaluasi dan 2,428 untuk variabel pelaporan yang mana H4 dan H5 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan tindak lanjut serta pelaporan dan penyampaian informasi memiliki pengaruh dalam upaya pencegahan kecurangan di DPR, MPR dan DPD RI.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fabio (2019) tentang “The Importance Of Enterprise Risk Management In Large Companies In Colombia”, yang menyatakan bahwa evaluasi dan pemantauan risiko memiliki hubungan yang positif dalam pengambilan keputusan perbaikan manajemen dalam rangka tindakan pengendalian untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dan mencegah kerugian dan kecurangan yang memengaruhi nilai pasar. Penelitian tersebut juga menerangkan bahwa 63,5% perusahaan besar di Kolombia memiliki sistem manajemen risiko canggih yang menerapkan langkah-langkah pengendalian untuk risiko yang dievaluasi dalam organisasi mereka. Selain itu,

66,7% menggunakan register peristiwa risiko untuk meningkatkan manajemen mereka, mengevaluasi semua risiko yang teridentifikasi dan terqualifikasi.

Pada penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa hasil pemantauan dan evaluasi kemudian dilaporkan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terlibat yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Ditegaskan bahwa menurut hasil penelitian Fabio (2019) 89,9% perusahaan besar di Kolombia memiliki persepsi bahwa keputusan utama manajemen risiko bergantung pada manajemen senior yang memiliki komitmen efektif terhadap manajemen risiko. Demikian pula, 69,7% dari perusahaan tersebut menggunakan hasil pemantauan risiko untuk membuat keputusan dan mengkomunikasikan hasil dan panduan manajemen risiko kepada pihak-pihak yang terlibat. komunikasi dan pelaporan antara pihak-pihak yang terlibat dan komitmen manajemen senior sangat penting untuk membangun saluran komunikasi yang jelas dan melaksanakan komitmen yang efektif oleh manajer risiko dalam organisasi.

Penerapan Enterprises Risk Management juga dapat meningkatkan nilai organisasi (Yudianto et al., 2021). Temuan kami juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya pengendalian internal dan manajemen risiko yang kuat di lingkungan pengendalian dan komponen pemantauan (Ayagre et al., 2014). Temuan lain adalah bahwa kesadaran yang lebih besar terhadap lingkungan pengendalian dan komponen pemantauan sistem pengendalian internal akan memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas sistem secara keseluruhan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa APIP, sebagai auditor internal di DPR, MPR dan DPD RI, telah melakukan pemantauan dan pencegahan kecurangan dengan sangat baik. Pemantauan memastikan Enterprise Risk Management dapat berjalan efektif dalam suatu organisasi.

Venter (2007) dalam penelitian Tarjo et al (2022) menyatakan bahwa organisasi dapat mencegah penipuan dengan lebih baik jika mereka secara aktif mengevaluasi dan menilai risiko dan kelemahan mereka terhadap penipuan. Pemantauan secara berkala harus dilakukan untuk memastikan penilaian. Penilaian risiko selalu mengidentifikasi risiko yang dihadapi organisasi baik secara internal maupun eksternal. Dengan cara ini, DPR, MPR dan DPD RI dapat lebih memperkuat upaya mereka dalam mencegah penipuan. Selain itu, pemantauan melalui audit internal dapat meningkatkan pencegahan kecurangan dalam organisasi (Alazzabi et al., 2020). Informasi dan komunikasi, serta pemantauan, merupakan komponen penting dari pengendalian internal yang efisien.

Strategi perencanaan dan penetapan sasaran merupakan upaya dalam menetapkan tujuan organisasi, melakukan analisis bisnis, menentukan risk appetite, membuat alternatif strategi. Melakukan evaluasi dan menentukan tujuan organisasi merupakan lingkup dari pilar Strategi dalam ERM. Pada misi dan visi yang ditetapkan oleh organisasi memberikan pandangan atas tipe dan jumlah risiko yang dapat diterima oleh perusahaan. Keduanya dapat membantu organisasi untuk membangun batasan - batasan dan fokus bagaimana suatu keputusan yang diambil mempengaruhi strategi perusahaan.

Oleh karena itu, dengan diterapkannya ERM yang berbasis Integrated Framework maka perusahaan dapat menyelaraskan kebijakan dan strategi perusahaan dengan tingkat risiko yang dapat diterima (risk appetite) yang telah ditetapkan oleh Manajemen, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan terhadap berbagai risiko yang dihadapi

oleh perusahaan. Selain itu, dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai risiko dan meminimalisir kerugian yang ditimbulkan atas berbagai risiko tersebut (Soegeng, 2018).

Hasil penelitian ini tidak signifikan ($t = 0,200$) atau H2 ditolak atau tidak sejalan dengan penelitian Soegeng (2018) dan Salifou, (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan penerapan COSO ERM Model dalam hal strategi organisasi, keunggulan kompetitif, dan peningkatan nilai. Beberapa responden penelitian juga memiliki masalah yang sama terkait dengan penerapan strategi organisasi yang belum berjalan secara efektif. Responden menyatakan sebagai berikut:

“Dalam penerapan manajemen risiko untuk menciptakan good governance, diperlukan komitmen pimpinan secara formal dalam menerapkan strategi dan kebijakan terkait dengan manajemen risiko”

Responden lain juga mengatakan bahwa:

“Belum dilakukan penentuan risk appetite dalam rangka mempertimbangkan strategi manajemen risiko di level pimpinan”

Responden juga mengatakan”

“Dalam pengambilan keputusan dan penentuan perencanaan strategi organisasi belum berdasarkan pertimbangan manajemen risiko”

Sebagian besar responden mengatakan bahwa memang diperlukan perhatian khusus terkait dengan komitmen pimpinan dalam menerapkan manajemen risiko dalam menentukan strategi organisasi dan pengambilan keputusan berbasis risiko. Hal tersebut juga berpengaruh atas tingkat maturitas manajemen risiko di lingkup DPR, MPR dan DPD RI yang masih rendah berdasarkan penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Lebih lanjut, pada variabel Governance atau tata kelola tidak memiliki nilai probabilitas yang signifikan yaitu 0,753 atau $t = 0,316$ yang mana H1 ditolak. Hasil penelitian tidak sejalan dengan Bromiley, McShane, Nair, & Rustambekov, (2015) yang menyatakan bahwa governance atau tata kelola memberikan pedoman tentang bagaimana manajemen risiko harus dilakukan; baik pada tingkat umum maupun secara khusus dengan jenis sektor ekonomi yang dimiliki oleh semua jenis perusahaan. Tata kelola perusahaan untuk manajemen risiko dipahami sebagai penetapan prinsip, pedoman, kebijakan, strategi, dan praktik yang baik untuk mengelola risiko (OECD, 2014). Selain itu, ini membantu mengendalikan manajemen, karena mengurangi kekhawatiran pemangku kepentingan akan penipuan, kebutuhan akan transparansi yang lebih besar, pengungkapan perusahaan ke pasar, dan peningkatan akuntabilitas dewan direksi (Demidenko & McNutt, 2010) pada Fabio (2019).

Namun hasil penelitian ini sejalan dengan Studi yang diselesaikan oleh (Togok, 2016) menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara struktur organisasi dalam tata kelola perusahaan dan efektivitas ERM di antara perusahaan publik Malaysia. Temuan ini juga didukung oleh literatur lain yang menemukan bahwa hubungan antara struktur organisasi dalam peningkatan tata kelola perusahaan dan efektivitas manajemen risiko tidak signifikan di antara lembaga keuangan di Thailand (Ranong & Phuengam, 2009) dalam Ahmad Sukhri (2019).

Dalam penerapannya di Sekretariat Jenderal DPR, MPR dan DPD RI, governance atau tata kelola memang belum sepenuhnya efektif dilaksanakan. Tolak ukur penilaian kinerja organisasi tidak berdasarkan bagus atau tidaknya tata kelola yang telah diterapkan, namun

kinerja organisasi dinilai berdasarkan tingkat kepuasan Anggota Dewan dan realisasi anggaran setiap tahunnya. Rendahnya monitoring dan tidak dilaksanakannya prosedur tata kelola dalam rangka pemenuhan kepuasan permintaan Anggota Dewan DPR, MPR, dan DPD RI membuat penerapan ERM dalam pencegahan kecurangan tidak berjalan secara efektif.

Tabel 6. Uji Regresi Pendeteksian Kecurangan sebagai Dependen Variabel

Tabel 6. Uji Regresi Pendeteksian Kecurangan sebagai Dependen Variabel							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-1.899	3.624		-.524	.602	
	Governance	.849	.203	.858	4.174	.000	H6 diterima
	Strategi	.365	.158	.194	2.314	.024	H7 diterima
	Manajemen Risiko	-.494	.209	-.464	-2.368	.021	H8 diterima
	Evaluasi	.035	.144	.035	.242	.810	H9 ditolak
	Pelaporan	.314	.106	.291	2.978	.004	H10 diterima

Tabel 6 menunjukkan bahwa empat pilar Enterprise Risk Management memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan yang berarti bahwa H6, H7, H8 dan H10 diterima. Governance, strategi, manajemen risiko, dan pelaporan secara signifikan memiliki pengaruh dalam mendeteksi kecurangan di DPR, MPR dan DPD RI. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul "The effect of enterprise risk management on prevention and detection fraud in Indonesia's local government" oleh Tarjo (2022) yang menyatakan bahwa komponen Manajemen Risiko Perusahaan menunjukkan signifikansi terhadap deteksi penipuan di pemerintahan daerah. Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Soegeng Soetedjo (2018) tentang "Penerapan Coso ERM Integrated Framework Dalam Mendukung Audit Forensik Untuk Menanggulangi Tindakan Kecurangan" yang menyatakan bahwa "Integrasi antara lima komponen pengendalian internal dengan ERM memberikan jaminan bagi manajemen bahwa tujuan organisasi akan tercapai secara efektif dan efisien termasuk mencegah dan mendeteksi terjadinya fraud". Joanne Eugenia (2022) menyatakan bahwa COSO ERM 2017 dalam memilih, mengembangkan, dan menerapkan kegiatan kontrol pencegahan dan deteksi, membangun proses pelaporan dan pendekatan terkoordinasi untuk penyelidikan dan tindakan korektif dan memantau risiko penipuan proses manajemen, laporan hasil dan meningkatkan proses pengendalian internal yang kuat akan meminimalisir terjadinya kecurangan (korupsi).

Beberapa responden terkait dengan penerapan ERM atas upaya deteksi kecurangan juga menyatakan bahwa:

"Kematangan manajemen risiko pada sebuah lembaga tidak akan terwujud apabila kegiatan assurance atau pengawasan dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan tidak berjalan secara efektif"

Responden lain juga mengatakan bahwa:

“Saat ini APIP di lembaga parlemen sudah mulai dilibatkan dalam kegiatan pendampingan untuk memperbaiki tata kelola manajemen dan penilaian risiko agar unit kerja instansi dapat mendeteksi dan mencegah kecurangan”

Lebih lanjut variabel evaluasi dalam salah satu dari lima pilar ERM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan yaitu memiliki nilai $t = 0,242$ dan nilai probabilitasnya sebesar 0,810 yang berarti bahwa H_0 ditolak. Hasil penelitian tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Irwan Putera (2022) yang menyatakan bahwa Audit internal merupakan kegiatan evaluasi dalam penerapan ERM sebagai sistem pengendalian internal, memberikan masukan untuk perbaikan dan juga memiliki peran penting dalam mengawasi kegiatan. Kegiatan audit internal dapat mencegah sekaligus mendeteksi kecurangan. Dalam penelitian Fabio (2019) juga menjelaskan bahwa dengan tidak dilakukan evaluasi, perusahaan tidak dapat mengetahui atau tidak dapat mengidentifikasi bahwa perusahaan akan menimbulkan masalah dengan kurangnya informasi tentang ancaman eksternal dan kelemahan internal organisasi. Dengan demikian, perusahaan besar Kolombia mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko (Mejia, 2017), karena mereka tidak menyadari pentingnya mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, menangani, dan memantau risiko, yang memungkinkan kejadian yang tidak menguntungkan atau memperburuk organisasi.

Dalam kerangka kerja juga COSO mengakui fakta bahwa semua organisasi memerlukan prosedur pengendalian internal formal dan merekomendasikan agar ukuran yang memadai digunakan dalam mengevaluasi apakah tujuan tercapai atau tidak. Kerangka kerja COSO menguraikan empat rekomendasi untuk memitigasi kecurangan yaitu: mempertimbangkan berbagai jenis kecurangan, menilai tekanan, peluang, dan rasionalisasi (Committee of Sponsoring Organization of the Threadway Commission, 2016).

Penerapan kegiatan evaluasi dalam manajemen risiko di DPR, MPR dan DPD RI juga belum dilaksanakan secara efektif, hal tersebut terungkap berdasarkan dari keterangan responden yang menyatakan bahwa :

“Penerapan manajemen risiko saat ini masih dalam sebatas pengumpulan dan pengidentifikasian risiko, belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut atas mitigasi risiko yang telah dilakukan”

Responden lain juga menyatakan bahwa:

“Evaluasi atas penerapan manajemen risiko belum dapat dilakukan karena adanya keterbatasan jumlah personel APIP dalam menjalankan penugasan”

Responden lain juga menyatakan bahwa:

“Penerapan manajemen risiko berupa pengisian risk register, evaluasi mitigasi dan tindak lanjut risiko yang dilakukan unit kerja hanya bersifat formalitas saja dalam memenuhi penilaian dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), belum terbentuk budaya sadar risiko yang memadai untuk dapat menerapkan ERM dalam mendeteksi kecurangan”

Table 7. R adjusted square

Table 7. R adjusted square				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Pencegahan	.627 ^a	.393	.349	2.51537

Pendeteksian	.767 ^a	.589	.559	1.48147
--------------	-------------------	------	------	---------

Berdasarkan uji adjusted R square pada variabel pencegahan kecurangan, ERM memiliki pengaruh sebesar 35%. Lebih lanjut pada variabel pendeteksian kecurangan ERM memiliki pengaruh sebesar 56% yang berarti bahwa terdapat faktor lain diluar variabel penelitian ini yang dapat mempengaruhi upaya pencegahan fraud di DPR, MPR dan DPD RI.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan lima pilar Enterprise Risk Management berdasarkan COSO 2017 yang terdiri dari Governance, Strategi, Manajemen Risiko, Evaluasi dan Pelaporan terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan atau fraud di lingkup Parlemen Indonesia yaitu DPR, MPR dan DPD RI.

Hasil penelitian berdasarkan pengujian regresi menunjukkan bahwa manajemen risiko, evaluasi dan pelaporan memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan terjadinya kecurangan. Lebih lanjut hasil penelitian juga menunjukkan bahwa governance, strategi, manajemen risiko dan pelaporan memiliki pengaruh signifikan dalam upaya mendeteksi kecurangan di lingkup Parlemen Indonesia. Pilar-pilar ERM berupa governance dan strategi tidak memiliki pengaruh signifikan dalam pencegahan kecurangan sedangkan variabel evaluasi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap upaya mencegah kecurangan.

Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa penerapan ERM di lingkup DPR, MPR dan DPD RI memang belum sepenuhnya berjalan efektif, walaupun saat ini lembaga parlemen tersebut masing-masing telah memiliki kebijakan tentang manajemen risiko dan telah memiliki daftar risiko. Salah satu faktor yang menyebabkan ERM belum sepenuhnya berjalan efektif adalah komitmen pimpinan yang tidak berfokus pada tata kelola manajemen, namun lebih kepada pemenuhan kepuasan layanan kepada anggota dewan DPR, MPR dan DPD RI. Beberapa faktor lain yang menjadi kendala penerapan ERM adalah pemerintah khususnya di lingkup parlemen yaitu masih kurang transparan dalam penyajian informasi sehingga membuat auditor internal mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi, menilai dan mengevaluasi risiko-risiko tersebut. Prosedur atau kebijakan yang sulit dijalankan secara maksimal karena faktor sumber daya manusia dan kompetensi yang terbatas.

Lebih lanjut, kurangnya budaya sadar risiko yang terjadi di dalam manajemen pemerintah juga menjadi salah satu faktor tidak berjalannya ERM dalam menciptakan tata kelola yang baik. Dalam menciptakan budaya sadar risiko peran dan komitmen pimpinan sangatlah diperlukan. Pimpinan harus dapat memberikan contoh yang baik dalam penyelenggaraan transparansi keuangan dan penggunaan anggaran pemerintah. Pimpinan harus dapat berkolaborasi dan memberikan dukungan kepada APIP dalam melakukan kegiatan pengawasan untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel dan berintegritas.

Beberapa kekurangan keterbatasan penelitian ini adalah :

- a. Personel APIP yang merupakan responden belum seluruhnya memahami tentang penerapan manajemen risiko sehingga, terdapat kecenderungan hasil penelitian bersifat terbatas;
- b. Lingkup responden hanya dilakukan oleh APIP yang merupakan auditor internal dalam menerapkan manajemen risiko dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan.

Namun, penelitian selanjutnya dapat dilakukan di lingkup yang lebih luas baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Selain itu, perlu dipahami bahwa pencegahan dan pendeteksian kecurangan bukan hanya tugas APIP tetapi seluruh elemen pemerintah. Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan manajemen risiko perusahaan dapat digunakan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z. and Taylor, D. (2009) 'Commitment to independence by internal auditors: the effects of role ambiguity and role conflict', *Managerial Auditing Journal*. Edited by B.J. Cooper, P. Leung, and S. Dellaportas, 24(9), pp. 899–925. Available at: <https://doi.org/10.1108/02686900910994827>.
- Annamalah, S. et al. (2018) 'Implementation of Enterprise Risk Management (ERM) framework in enhancing business performances in oil and gas sector', *Economies*, 6(1). Available at: <https://doi.org/10.3390/economies6010004>.
- Bertinetti, G.S., Cavezzali, E. and Gardenal, G. (2013) 'The Effect of the Enterprise Risk Management Implementation on the Firm Value of European Companies', *SSRN Electronic Journal [Preprint]*. Available at: <https://doi.org/10.2139/ssrn.2326195>.
- Blanco-Mesa, F. et al. (2019) 'The importance of enterprise risk management in large companies in colombia', *Technological and Economic Development of Economy*, 25(4), pp. 600–633. Available at: <https://doi.org/10.3846/tede.2019.9380>.
- Governance, B.G.R.C. et al. (2020) 'COSO ERM 2017 – Kinerja □', pp. 11–13.
- Klamut, E. (2018) 'Internal Audit Tool for Minimizing the Risk of Fraud', *e-Finanse*, 14(1), pp. 49–68. Available at: <https://doi.org/10.2478/fiqf-2018-0005>.
- Putra, I. et al. (2022) 'the Influence of Internal Audit, Risk Management, Whistleblowing System and Big Data Analytics on the Financial Crime Behavior Prevention', *Cogent Economics and Finance*, 10(1), pp. 1–28. Available at: <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2148363>.
- Shin, I. and Park, S. (2017) 'Integration of enterprise risk management and management control system: Based on a case study', *Investment Management and Financial Innovations*, 14(1), pp. 19–26. Available at: [https://doi.org/10.21511/imfi.14\(1\).2017.02](https://doi.org/10.21511/imfi.14(1).2017.02).
- Soetedjo, S. and Sugianto, A. (2018) 'Penerapan Coso Erm Integrated Framework Dalam Mendukung Audit Forensik Untuk Menanggulangi Tindakan Kecurangan', *Journal of Applied Managerial Accounting*, 2(2), pp. 262–274. Available at: <https://doi.org/10.30871/jama.v2i2.944>.
- Tarjo, T. et al. (2022) 'The effect of enterprise risk management on prevention and detection fraud in Indonesia's local government', *Cogent Economics and Finance*, 10(1). Available at: <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2101222>.
- Yazid, A.S. et al. (2018) 'Organizational Factors in Enterprise Risk Management Effectiveness: A Conceptual Framework', *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(11). Available at: <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i11/5202>.
- Salifou, D. (2015) 'Analysis Of The Effectiveness Of Coso ' S Erm Model On Organization Strategy , Competitive Advantage , And Value : A Qualitative Study By Daniel A . Salifou RAJ SINGH , PhD , Faculty Mentor and Chair Charlotte Neuhauser , PhD , Committee Member SHURRON FA', *Capella University ProQuest Dissertations Publishing*, 2016. 10002584